

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Blitar terletak di Jawa Timur. Di sinilah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dimakamkan. Selain itu di sini pernah terjadi pemberontakan anggota PETA (Pembela Tanah Air) yang dipimpin oleh Sujanco Supriyadi, pada masa pendudukan Jepang. Secara geografis, di bagian utara Kabupaten Blitar berbatasan dengan kabupaten Malang dan Kediri, di selatan dengan Samudera Hindia, di timur dengan kabupaten Malang, dan di barat dengan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Blitar dibelah oleh Sungai Brantas menjadi dua kawasan yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan. Dibandingkan dengan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur, hal ini disebabkan karena wilayah ini merupakan pegunungan kapur yang tandus dan berbukit-bukit, sedangkan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur akibat pengaruh Gunung Kelud dan cukupnya persediaan air.¹ Meski demikian, daerah bagian selatan Kabupaten Blitar strategis dari sudut militer, tahun 1967 pernah digunakan sebagai basis sisa-sisa anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terkenal dengan sebutan

¹ "Aplikasi Teknologi Indraja dan Sistem Informasi Geografi untuk Pemetaan Kesesuaian Lahan Kabupaten Blitar", <http://www.bakosurtanal.go.id/2Pssda/akhir7.html>

PKI Malam atau PKI Gaya Baru, tetapi para petugas keamanan pemerintah menumpas mereka dalam Operasi Trisula.²

Melihat kondisi alam Blitar Selatan, maka daerah ini sulit mendapatkan makanan pokok seperti padi, sehingga masyarakat sangat terbiasa dengan makanan yang rendah gizi dan protein, seperti umbi-umbian, gaplek atau ketela pohon (yang juga terkenal dengan nama *thiwul*³ sebagai makanan tradisional-nya).

Ironisnya lagi, pada tahun 1966 di Blitar Utara, sebagai pusat perekonomian se-kabupaten Blitar, mengalami kelumpuhan akibat meletusnya Gunung Kelud. Hal ini mengakibatkan masyarakat Blitar Selatan tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya seperti biasa dan juga kebutuhan akan bahan-bahan pokok masyarakat tidak dapat terpenuhi. Bahaya kelaparan mau tidak mau bagi masyarakat Blitar Selatan waktu itu bersifat “laten”.

Mulai awal tahun 1960-an hingga pada masa pergantian rezim, dari rezim orde lama menuju orde baru, kelaparan bukan hanya menimpa daerah minus seperti Blitar Selatan, melainkan juga merupakan masalah nasional hingga mampu mempopulerkan kembali istilah lama di zaman Hindia Belanda, yakni istilah “perut keroncongan”.⁴

² *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3., (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 401-402.

³ *Thiwul* adalah makanan tradisional yang dibuat dari bahan baku gaplek atau ketela pohon dengan cara dikeringkan terlebih dahulu lalu selanjutnya ditumbuk atau digiling hingga halus, setelah halus dicampur sedikit air lalu dikukus. Setelah kukusan matang warna menjadi coklat dan gembur seperti nasi, sampai di sini bisa disebut *thiwul*.

⁴ *Bahagia*, no.5, 8 Juni 1966, (Surabaya : Surabaya Post), hlm. 12-13.

Salah satu penyebab bencana nasional ini adalah terhitung sampai awal orde baru, produksi beras dalam negeri sudah tidak mencukupi. Di samping pertumbuhan penduduk meningkat kurang lebih dua juta manusia-baru yang juga memerlukan bahan makan. Pertambahan jumlah penduduk ini makin lama makin tinggi sehingga di masa orde baru inilah, Indonesia mulai mengimpor beras dalam jumlah besar yakni ratusan ribu ton setiap tahun.⁵

Pada saat yang sama, kemenangan-kemenangan revolusi besar kebudayaan Proletar di Tiongkok telah mengkonsolidasi Tiongkok yang sosialis dan dipandang sebagai benteng revolusi dunia yang paling kokoh dan terpercaya,⁶ merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi pejuang-pejuang revolusioner di Indonesia, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebagai daerah agraris, penduduk Indonesia didominasi oleh kaum Tani, yang juga mirip dengan situasi di Tiongkok. Ada persamaan nasib di tingkat rakyat, bahwa rakyat di dua negara itu mengalami bencana nasional kelaparan.⁷ Bencana itu oleh PKI dianggap sebagai akibat sistem pemerintahan, baik Orde Lama maupun Orde Baru, yang menerapkan sistem neo-kolonialisme, imperialisme modern, feodalisme, kapitalis, bahkan sistem fasisme yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat proletar. Mungkin hal yang sama juga terjadi di daerah sekitar Blitar, terutama Blitar Selatan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ Politbiro CC PKI, *Tegakkan PKI Jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia: Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI*, (Djawa Tengah : Delegasi CC PKI, 1971), hlm. 231-232.

⁷ *Bahagia*, no.5, *loc. cit.* ; Lihat juga lampiran 1 dalam riset ini.

Sejak lama sebelum terjadi pemberontakan PKI di Madiun 1948, aksi-aksi yang dilakukannya sudah ditunjukan di daerah ini. Di Blitar Utara pasukan PKI memusatkan kekuasaannya di daerah Nglegok, dan Blitar Selatan di daerah Lodoyo. Bagi PKI, kota Blitar mempunyai nilai politis, militer, dan ekonomis yang besar. Dari segi militer daerah Blitar menguntungkan karena medannya berupa pegunungan yang cocok untuk berperang secara gerilya, sekalipun tidak direncanakan sebagai basis konsolidasi. Di samping itu, kota Blitar juga sebagai tempat berputarnya roda pemerintahan Jawa Timur (terutama sekitar tahun 1948-1949). Pejabat-pejabat penting Jawa Timur yang bertempat tinggal di Blitar antara lain Gubernur Jawa Timur (masa jabatan 1948-1949) Murdjani, Kepala Kepolisian Jawa Timur, Komandan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, Komisar Polisi Moh. Jasin.⁸

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, dapat ditemukan bahwa ada faktor kausalitas antara munculnya larang pangan dan gerakan⁹ PKI di Blitar Selatan, di samping dilatarbelakangi oleh faktor politik, juga bersinggungan dengan faktor sosial-ekonomi, serta faktor geografis atau keadaan alam di Blitar Selatan.

⁸ Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: MB-ABRI & Yayasan Telapak, 1995), halaman 139-140.

⁹ Definisi gerakan dalam penelitian ini yakni usaha atau kegiatan di lapangan sosial (termasuk di dalamnya masalah ekonomi dan politik). Jadi khususnya gerakan PKI di Blitar Selatan dapat diartikan sebuah gerakan sosial yang didalamnya terdapat tindakan terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau perbaikan, khususnya perbaikan ekonomi dan perubahan politik, sebagai gerakan perlawanan untuk mempertahankan dan melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, dalam hal ini yaitu PKI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1960-an.

B. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

1. Lingkup Pembahasan

a. Lingkup Spatial

Lingkup spatial dalam penelitian ini dibatasi wilayah Blitar Selatan sebagai pusat gerakan PKI Gaya Baru. Pembatasan itu diharapkan mampu mengeksplorasi semaksimal mungkin informasi-informasi yang ada di Blitar Selatan waktu itu, mengingat masih sedikitnya pembahasan-pembahasan khusus mengenai kota PETA ini. Kurangnya penelitian tentang masalah ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, masyarakat dan pemerintah masih menganggap masalah paham komunis sebagai isu yang sangat sensitif yang dapat memungkinkan terjadinya bentrokan intern dalam masyarakat. *Kedua*, jarangny penulisan ini juga karena sulitnya mendapatkan sumber-sumber dari pemerintahan daerah maupun pusat.

Sebenarnya banyak dokumen-dokumen atau media massa yang diterbitkan tahun 1960-an (khususnya tahun 1965 – 1968), tidak sepaham dengan pemerintah waktu itu, namun harus mengalami pembredelan atau pelarangan oleh pihak militer.¹⁰

¹⁰ Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. x.; Dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan Pudji Rahardjo (Balongsari Surabaya) selaku mantan aktifis SOBSI Surabaya dan Oei Hiem Hwie (Medayu Rungkut Surabaya) selaku mantan aktifis Front Nasional Jatim yang mana semua koleksi pribadi buku-bukunya dan dokumen-dokumennya yang berbau “kiri” tidak dapat terselamatkan meskipun mereka sudah berusaha menyebarkan arsip tersebut kepada teman-teman terpercayanya.

b. Lingkup Temporal

Secara temporal, lingkup pembahasan penelitian ini yaitu antara tahun 1963 – 1968. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di tahun 1963-65 merupakan krisis ekonomi dan sekaligus krisis pangan (baca : beras) di Nusantara karena salah satunya terjadi pemutusan bantuan ekonomi oleh Amerika.¹¹ Daerah minus seperti Blitar Selatan tentu lebih menderita dan lebih krisis dari daerah sekitarnya. Bersamaan dengan itu terjadi aksi-aksi BTI-PKI terhadap penerapan UUPA tahun 1960 yang dianggap tidak konsisten. Sedangkan tahun 1966-68 adalah masa terakhir kebangkitan kekuatan PKI di Indonesia dengan “wajah baru”-nya, yaitu konsep “dari desa kepong kota”.

2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji di dalam riset ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran PKI memusatkan aktivitas-aktivitas konsolidasi di Blitar Selatan ?
2. Bagaimana PKI menjalankan strateginya ketika masyarakat Blitar Selatan mengalami krisis ekonomi dan krisis pangan ?

¹¹ Lihat hasil wawancara antara Presiden Soekarno dengan Wartawan CBS (media elektronik AS) mengenai penarikan bantuan Amerika terhadap Indonesia setelah adanya pernyataan dari Soekarno yang berbunyi “*go to hell with your aid*” yang ditujukan kepada Dubes AS di Jakarta., dalam *Duta Masyarakat.*, Kamis, 20 Mei 1965.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman bahwa ada faktor pencetus lain dari munculnya gerakan *come back*-nya PKI di Blitar Selatan, selain masalah politik.
2. Ingin mengetahui seberapa jauh kepedulian PKI beserta strategi politiknya terhadap permasalahan sosial-ekonomi masyarakat Blitar Selatan.

Di samping tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam peningkatan dan pengembangan Ilmu Sejarah yang multidisipliner. Juga, mengingat belum banyaknya penulisan tentang sejarah perekonomian yang melatar-belakangi peristiwa tahun 1960-an di Indonesia, maka kajian ini sangat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan tentang dinamika masyarakat pedesaan di Blitar Selatan tidak banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Kalaupun ada yang mengulasnya, hanya sebatas nukilan peristiwa yang digunakan sebagai pelengkap peristiwa-peristiwa yang lebih besar (terutama peristiwa pemberontakan PKI) seperti misalnya bukunya Soegiarso Soerojo, "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai" juga memberikan kontribusi penting bagi penulisan ini. Dalam buku tersebut, dibahas cukup banyak upaya-upaya PKI untuk menyusun kekuatan di Blitar Selatan, beserta struktur

organisasinya hingga pembahasan mengenai penumpasan dan pelumpuhannya yang dilakukan oleh ABRI dengan Operasi Trisula-nya,¹² serta buku berjilid (ada 5 jilid) dari Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI (“Bahaya Laten Komunis di Indonesia”, jilid 2 dan 5).¹³ Sedangkan buku yang mengulas penuh tentang Blitar Selatan hanya dapat kita temui di Laporan Operasi Trisula Kodam VIII/Brawijaya, yang banyak memaparkan teknik-teknik ABRI dalam menumpas gerakan sisa-sisa PKI di Blitar Selatan.¹⁴

Dengan kelangkaan sumber buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, khususnya masalah ekonomi, maka penulisan ini juga menekankan pada sumber primer, baik dalam bentuk *Oral History*, laporan-laporan yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, dokumen-dokumen penting departemen terkait seperti dokumen rahasia Politbiro CC-PKI, yang berjudul : *Tegakkan PKI Jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia : Lima Dokumen Penting Politbiro CC-PKI*, 1971, buku ini merupakan kumpulan lima dokumen penting Politbiro CC PKI yang berisi bahan-bahan yang mencerminkan perkembangan ditegakkannya garis Marxis-Leninis-Mao Ze Dong di dalam PKI, setelah PKI dan gerakan revolusioner Indonesia menderita pukulan-

¹² Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai : G30S/PKI dan Peran Bung Karno*, (Jakarta : CV.Sri Murni, 1988).

¹³ Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *op. cit.*.

¹⁴ Semdam VIII Brawidjaja, *Operasi Trisula Kodam VIII/ Brawidjaja*, (Surabaya : Semdam VIII Brawidjaja dibantu IKIP Malang Pusat Jajasan Taman Tjandrawilwatika, 1969).

pukulan yang amat berat sesudah peristiwa “Gerakan 30 September”¹⁵, maupun dokumen penting dalam bentuk UU atau Dokumen Negara/ Lembaran Negara yang sejaman.

Sedangkan untuk memperkuat fakta-fakta yang tampak dari sumber primer yang ada, juga digunakan bantuan dari sumber sekunder seperti media massa yang sejaman seperti mingguan Majalah *Bahagia* (yang diterbitkan oleh *Surabaya Post*, 1966, yang mana dalam pemberitaan tersebut disinggung keterkaitan antara krisis pangan dan revolusi di Indonesia dengan revolusi rakyat sosialis Tiongkok oleh Mao Ze Dong), harian *Duta Masyarakat*, *Harian Djawa Timur*, *Trompet Masyarakat*, dan juga bantuan dari Ikhtisar Laporan Berita *ANTARA*.

Dari sumber-sumber sejarah di atas, upaya interpretasi tidak akan dapat berjalan lancar jika kita tidak menggunakan konsep-konsep dan teori-teori sosial yang erat hubungannya dengan tema penelitian ini. Adapun teori dan konsep yang berkenaan dengan masalah ekonomi, demografi, dan pertanian, terdapat pada bukunya Fadjar Pratikto yang berjudul *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*.¹⁶ Buku ini pada umumnya membahas keterkaitan yang erat antara munculnya gerakan rakyat kelaparan beserta wabah penyakitnya HO (*Honger Oedeem*) dengan kondisi politik di Gunung Kidul (Yogyakarta), baik politik partai maupun politik elit, yaitu mulai diberlakukannya program intensifikasi pertanian

¹⁵ Politbiro CC PKI, *op.cit.*, hlm. 1.

¹⁶ Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan : Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta : Media Pressindo, dkk, 2000)

(tahun 1959) hingga munculnya puncak kekacauan ekonomi dan politik di masa orde lama (tahun 1963-64).¹⁷ Meskipun lingkup spasial yang difokuskan dalam buku ini lebih mengarah pada wilayah Jawa Tengah DIY, khususnya spasial Gunung Kidul, namun secara temporal bersamaan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Karya Bonnie Setiawan, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*.¹⁸ Buku ini banyak memperdebatkan konsep-konsep kapitalis yang sudah menjadi formasi sosial masyarakat Indonesia waktu itu (tahun 1960-an) hingga sekarang, yang terkenal dengan paham Pembangunanisme (*Developmentalism*). Sedangkan paham tersebut, pada mulanya diprakarsai oleh pemerintahan Amerika Serikat dalam konteks memenangkan perang ideologi, yang terkenal dengan *Cold War* untuk membe ridung pengaruh komunisme dan sosialisme di Dunia Ketiga.¹⁹

Untuk melengkapi pembahasan tentang konsep dan definisi kelaparan serta krisis pangan khususnya di Blitar Selatan, maka akan digunakan buku karyanya Foster dan Anderson yang berjudul *Antropologi Kesehatan*, yang menjelaskan masalah kesehatan, khususnya masalah kelaparan yang merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kesehatan di sebagian terbesar negara-negara di dunia karena kelaparan dan kekurangan gizi menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xxxv.

¹⁸ Bonnie Setiawan, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*, (Yogyakarta : Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

menyebabkan banyak penyakit kronis, dan menyebabkan orang tidak mungkin melakukan kerja keras. Banyak spesialis percaya bahwa kekurangan protein-kalori dalam periode kanak-kanak setelah disapih menyebabkan kerusakan otak yang permanen.²⁰ Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi SDM bangsa kita menurun dan mudah diombang-ambingkan oleh arus ideologi yang masuk dari luar, tanpa bisa bersikap kritis terhadapnya.

Dari semua referensi di atas, belum final, dan masih banyak yang lain yang berkaitan dengan tema riset ini. Namun, dari beberapa referensi yang ditampilkan di atas, penulis kira cukup memberikan bukti konkrit bahwa penelitian sejarah Blitar Selatan ini benar-benar perlu. Kendati penulisan mengenai PKI sudah cukup banyak dan bahkan terasa membosankan, tetapi akan lain kesannya jika kita hendak menyelidiki eksistensi PKI beserta fenomena yang mengiringinya dari sudut pandang sosial-ekonomi, apalagi dengan *setting* sejarah lokal Blitar Selatan. Hal inilah yang mungkin membedakan penelitian sejarah dalam skripsi ini dengan penelitian-penelitian sejarah maupun politik terdahulu yang penulis cantumkan di atas, mengenai persoalan yang sama yakni PKI.

E. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori

Sebelum menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, ada baiknya mengkaji lebih dahulu teori dan konsep yang terkait dalam tema riset ini.

²⁰ Foster/Anderson, *Antropologi Kesehatan*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 311.

1. Lapar dalam Sejarah dan Definisi

Satu batu bersurat yang ditemukan di salah satu lembah Sungai Nil menceritakan bahwa bahaya lapar telah mengancam manusia jauh sebelum ada masalah yang disebut "*population explosion*" atau ledakan penduduk. Seorang Pharaoh (bangsawan) dari Mesir dalam batu bersurat itu menceritakan bagaimana pada suatu zaman kemarau yang berlangsung tujuh tahun, negara dan rakyatnya terjerumus ke dalam malapetaka yang besar. Pharaoh itu menulis:

"Dari tahta saja, saya amat berduka cita atas malapetaka ini. Tujuh tahun lamanya sungai Nil tidak mengairi tanah-tanah di sepanjang pematangnya. Jagung sukar didapat dan bahan makanan sedikit sekali. Manusia yang dulunya baik-baik, menjadi maling dan merampas harta benda tetangganya. Siapa yang biasa berlari, tidak berdaya untuk berjalan. Anak-anak menangis dan orang-orang muda berjalan tertatih-tatih seperti orang tua. Semangat mereka telah runtuh, dewan bangsawan kosong. Semua persediaan makanan telah habis. Rupanya telah tiba saat terakhir bagi segala-galanya."²¹

Fenomena kelaparan yang diungkapkan dalam Majalah Bahagia tahun 1966 tersebut memperlihatkan betapa waktu itu, khususnya lingkup Jawa Timur, masih merasakan adanya bencana kelaparan oleh karena memburuknya sistem perekonomian dalam negeri dengan adanya inflasi. Sudah barang tentu sebagai bagian wilayah Jawa Timur, Blitar Selatan tentu terkena imbasnya.²²

Wajah-wajah kelaparan juga pernah menimpa anak-anak penduduk Jerman pada masa Depresi setelah Perang Dunia I. Bencana kelaparan yang paling

²¹ Arifin Bey dalam *Bahagia*, no. 13, 1966.

²² Lihat lampiran I dalam riset ini.

mengerikan dalam sejarah disebabkan kegagalan panen akibat kekeringan, penyakit tetumbuhan, dan gangguan serangga, akan tetapi peperangan, banjir, dan gempa bumi pun telah pula menuntut korbannya. Padatnya penduduk, komunikasi yang jelek, dan ekonomi yang hanya mengandalkan satu jenis hasil pertanian saja juga dapat menyebabkan banyak negara dengan mudah diserang bencana kelaparan.²³

Bencana kelaparan dan malagizi²⁴ tentu sudah ada sejak dahulu. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula ilmu pengetahuan yang diperlukan manusia untuk menghasilkan cukup pangan yang seimbang bagi seluruh penduduk dunia. Kini diketahui bahwa di samping oksigen dan air, orang membutuhkan sekurang-kurangnya empat puluh tiga nutrisi pokok yang diklasifikasikan menjadi lima kelompok utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kekurangan salah satu nutrisi tersebut, terutama protein dapat menimbulkan penyakit.²⁵

Protein merupakan makanan berkualitas tinggi yang paling mahal dan termasuk di antara pangan yang vital bagi manusia. Protein merupakan zat kimia dengan molekul besar dan rumit yang terdiri dari berbagai gabungan kira-kira 20

²³ William H. Sebrell Jr., dkk (tim Editor Pustaka Time Life), *Kesehatan dan Penyakit*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1985), hlm. 77.

²⁴ Malagizi adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang meliputi protein, karbohidrat, dan vitamin.

²⁵ William H. Sebrell Jr., dkk (tim Editor Pustaka Time Life), "Kesehatan dan Penyakit", *op. cit.*, hlm. 76.

jenis asam amino dan sekurang-kurangnya sembilan jenis penting bagi makanan anak. Semua asam amino meningkatkan pertumbuhan selama masa anak-anak yang menentukan dan membantu pembaharuan jaringan. Dalam alam, protein mula-mula dibuat oleh tumbuhan dengan menggunakan nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon di tanah dan udara. Jadi, baik manusia maupun binatang akhirnya tergantung pada tumbuhan sebagai sumber protein.²⁶

Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan protein secara langsung yaitu busung lapar, yang disebut juga dalam istilah Belanda *Honger oedeem* (HO)²⁷. Dahulu penderita HO sering dijumpai di beberapa daerah yang rawan pangan.²⁸ Kekurangan gizi protein biasanya juga disertai kekurangan karbohidrat yang menjadi sumber kalori. Karena itu, sekarang lebih dikenal dengan istilah Kekurangan Kalori dan Protein (KKP). Penderitanya sangat kurus, kulitnya keriput sehingga wajah anak kecil yang menderita KKP tampak seperti orang tua. Munculnya penyakit ini ditandai oleh pembengkakan tubuh dan membuncitnya perut. Tanda lainnya adalah terhambatnya pertumbuhan, kulit

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ciri-ciri korban penyakit HO yaitu perutnya membuncit, pipi membengkak, kulit berbintik-bintik dan rambut kehilangan warna. Banyak dari lemak mereka sebenarnya adalah pembengkakan yang disebabkan kelebihan cairan dalam jaringan tubuh. Lihat William F. Sebrell Jr, dkk (tim Editor Pustaka Time Life), *Makanan dan Gizi*, ed-2, (Jakarta : Tira Pustaka, 1986), hlm. 18.

²⁸ Khusus pada awal dekade 1960-an, Blitar Selatan sempat merasakan bencana rawan pangan tersebut. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh kekurangan protein dengan habisnya tanaman pangan (seperti padi, gaplek, dll) akibat serangan hama tikus.

berbercak-bercak dan bersisik, rambut kusam dan mudah dicabut, kehilangan selera makan, pembengkakan hati, serta anemia.²⁹

Kekurangan protein merupakan penyebab terpenting dari malagizi yang mungkin diderita oleh separuh penduduk dunia. Daftar yang dibuat oleh majalah Life menyebutkan bahwa makanan yang biasa dimakan oleh orang yang tinggal di zona iklim sedang dibandingkan dengan yang biasa dimakan di daerah tropik jauh berbeda. Makanan di daerah tropik (per 100 kalori) tidak menghasilkan cukup protein untuk orang dewasa sekalipun, dan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan bayi. Adapun makanan-makanan yang biasa dikonsumsi penduduknya di daerah tropis seperti: beras, jagung, kentang, pisang, ubi-ubian, ubi kayu (gaplek/singkong), gula, dan lemak. Sedangkan di daerah beriklim sedang mempunyai variasi makanan lebih kaya: protein seperti: ikan laut, daging, susu, kacang-kacangan, kacang tanah, dan gandum.³⁰

2. Teori Inflasi menurut Keynes

Kecenderungan dari harga-harga yang naik secara terus menerus itulah yang disebut Inflasi. Hal ini timbul sebagai akibat perimbangan yang pincang antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Berdasarkan parah tidaknya inflasi, suatu negara akan mengalami Hiperinflasi jika

²⁹ Endang Rahman dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3. (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 588.

³⁰ William H. Sebrell Jr., dkk (tim Editor Pustaka Time Life), "Makanan dan Gizi, ed-2", *op. cit.*, hlm. 79.

nilai inflasi berada di atas 100 % selama satu tahun.³¹ Fenomena ini pernah dialami oleh Indonesia, tepatnya di awal dekade 1960-an hingga klimaksnya di tahun 1966. Hiperinflasi mampu menghancurkan bukan hanya sendi-sendi ekonomi moneter tetapi juga sendi-sendi sosial politik dari suatu masyarakat.

Untuk memperjelas fenomena inflasi di Indonesia dekade 1960-an, perlu kiranya untuk meninjau kembali teori makro ekonomi tentang inflasi yang dicetuskan oleh Keynes, pakar ekonomi modern Amerika Serikat, yakni:

“Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan lain perkataan, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan cara menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk melakukan investasi-investasi baru dan memperkokoh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan tersebut bisa pula berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktivitas buruh. Bila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat maka *inflationary gap* timbul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga berarti bahwa sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan

³¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 49-51.

tersebut tidak bisa terpenuhi. Pada periode selanjutnya golongan-golongan tersebut akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi (dari percetakan uang baru atau kredit dari bank yang lebih besar atau dari kenaikan gaji yang lebih besar). Tentunya tidak semua golongan berhasil memperoleh tambahan dana yang diinginkan. Golongan yang bisa memperoleh dana lebih banyak, dapat memperoleh bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak bisa memperoleh dana, akan mendapat bagian output yang lebih kecil. Yang termasuk golongan yang "kalah" dalam proses perebutan ini adalah golongan-golongan yang berpenghasilan tetap atau yang penghasilannya tidak naik secepat laju inflasi (golongan ini antara lain termasuk kaum pensiunan, pegawai negeri, para petani yang harus menjual hasilnya pada harga yang dikenakan stabilisasi harga, para karyawan perusahaan yang tidak mempunyai serikat buruh atau yang tidak mempunyai saluran efektif untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka). Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif total tidak melebihi, pada harga-harga yang berlaku, jumlah output yang tersedia.³²

3. Implementasi Ajaran Karl Marx (*Marxisme*)

Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara, tidak boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Dengan kata lain menurut Marx, manusia harus hidup lebih dahulu baru dia dapat berpikir. Hidup, secara mudahnya, adalah masalah perut.³³ Teori ekonominya itu berupa teori nilai berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi kapital, teori konsentrasi kapital, teori krisis dan keruntuhan, dan teori kesengsaraan. Semuanya pada

³² *Ibid.*, hlm. 59-61.

³³ Barangkali dapat disertakan di sini ucapan Jacop Moleschott (1822-1893), seorang filosof Jerman yang mengatakan *Oline Fosfor Keine Gedanke* (tanpa fosfor pikiran tak ada), lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 200.

intinya merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan berpunya hidup dari tenaga golongan tak berpunya.³⁴

Teori Kesengsaraan merupakan salah satu bagian dari ajaran Marxisme yang menyatakan bahwa berhubungan dengan harga tenaga dan kelebihan harga, teori pemusatan, dan pertimbangan dalam pertentangan kelas borjuis dengan kaum proletar, maka kaum modal menjadi kaya, sedangkan kaum proletar makin menjadi miskin. Kesengsaraan kaum buruh makin menghebat karena kaum pengusaha makin lama makin mempergunakan mesin-mesin dan menjalankan rasionalisasi dalam perusahaan yang menyebabkan banyak kaum buruh menjadi penganggur.³⁵

Selanjutnya diteruskan dengan teorinya tentang Krisis dan Keruntuhan (*Zusammenbruch-theori*), yang menyatakan bahwa setelah ada proses imperialisme-kolonialisme maka terjadi produksi secara besar-besaran yang berasal dari daerah-daerah bahan mentah (jajahan) sehingga menimbulkan *over-produktif*, yaitu melebihi kebutuhan dan kekuatan kaum pembeli. Penghasilan yang berlebih-lebihan ini mengakibatkan krisis dalam industri dan perusahaan-perusahaan, akhirnya dengan menghebatnya krisis tersebut, maka hal tersebut mengancam kaum modal dengan bahaya kebangkrutan. Disinilah negara kemudian memegang produksi, tidak untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk

³⁴ Lihat Hatta, "Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi", dalam *ibid.*, hlm. 201.

³⁵ Pringgodigdo (ed.), *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan kanisius), hlm. 145.

memenuhi kebutuhan sekalian rakyat. Sehubungan dengan itu, maka semboyan dalam manifesto komunis ialah: "Kaum proletar sekalian negeri, bersatulah!"³⁶

Teori-teori tersebut timbul dalam pikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya, sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah bernegara. Marx berpendapat bahwa pada mulanya dalam kehidupan primitif komunal yang alat-alat produksi dimiliki bersama, penghisapan manusia oleh manusia tidak didapati. Kelas masyarakat tidak ada, penindasan pun tidak pula. Masyarakat pun tidak mengenal kekuasaan, oleh sebab itu, tidak mengenal negara. Dan itulah yang merupakan cita-cita akhir dari konsep komunismenya Marx yang menyatakan bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada.³⁷

Sehubungan dengan itu, dalam implementasinya, teori dan konsep komunisme mengalami perkembangan dalam percaturan politik dunia di masa perang dingin. Pada fase inilah sebenarnya kolonialisme (sebagai lawan politik komunisme) dengan wajah barunya muncul kembali, yaitu dengan nama Imperialisme. Diakui atau tidak, sebenarnya kedua negara (Soviet - Amerika) melakukan tindakan-tindakan imperialis, meskipun pada kesempatan yang sama Soviet tidak dapat menerima tuduhan tersebut. Berpangkal dari masalah implementasi teori-teori Karl Marx yang tidak dapat diterapkan secara konsekuen ini, maka muncul tindakan-tindakan protes dari sesama partai komunis

³⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

³⁷ Lihat Engels, "The Origin of the Family, Private Property and State", dalam Deliar Noer, *loc. cit.*.

internasional, khususnya oleh Partai Komunis Tiongkok (pimpinan Mao Ze Dong).³⁸

Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, tahun 1960 partai komunis sedunia telah menyusun pernyataan bersama guna mempererat hubungan antar negeri komunis dan membendung laju kekuatan kapitalis di muka bumi, antara lain tercetus ke dalam tiga point doktrin untuk memerangi musuh utama³⁹ :

1. Imperialis Amerika Serikat telah menjadi eksploiter internasional terbesar.
2. Amerika Serikat merupakan sarang utama kolonialisme gaya baru.
3. Imperialis Amerika Serikat memiliki kekuatan utama dalam melancarkan Agresi Militer dan Perang.

Oleh karena itu, ada perbedaan fundamental antara Amerika Serikat dengan Soviet menurut Marxist-Leninist yang konsisten yaitu⁴⁰ :

1. Ada kontradiksi yang nyata antara kubu Sosialis dan kubu Imperialis
2. Ada kontradiksi yang nyata antara masyarakat proletar dengan masyarakat borjuis di negara-negara kapitalis.
3. Ada kontradiksi yang nyata antara penindasan antarnegara dengan imperialisme.

³⁸ Surat CC PKT tanggal 7 Mei 1964 kepada CC PKUS, *Tujuh Surat Antara Komite Central Partai Komunis Tiongkok dan Komite Central Partai Komunis Uni Soviet*, (Peking: Pustaka Bahasa Asing (dicetak di RRC), 1964), hlm. 4-7.

³⁹ The Letter of The Central Committee of The Communist Party of China on June 14, 1963, in reply to the Letter of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union of March 30, 1963., *op. cit.*, hlm. 6-11.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Ada kontradiksi yang nyata antara daerah-daerah imperialis dan kelompok-kelompok monopoli kapitalis.

4. Komunisme di Indonesia

Sebagai pencetus awal pemikiran komunis, Karl Marx terlebih dahulu menganalisis masa peralihan kapitalisme melalui konteks yang dicontohkannya yakni di Eropa Barat, khususnya Inggris, yang saat itu sedang mengalami masa peralihan dari cara produksi feodal menuju cara produksi yang kapitalis. Tahap penting yang hendak ditunjukkan Marx adalah ketika perubahan dari hak feodal menjadi pemilikan pribadi sepenuhnya terhadap tanah, termasuk hak mengusir penggarap yang ada di situ. Dengan mengusir petani dari tanahnya (dengan berbagai cara), alat produksi (yaitu tanah) yang dikonsentrasikan ke tangan tuan tanah, sehingga petani lama-kelamaan menjadi proletariat, yaitu orang-orang yang menjual tanah kerjanya hingga tersingkir dan berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian terjadilah surplus pertanian yang semakin meningkat, belum lagi adanya keuntungan dari ekspansi industri dari kota ke desa. Menurut Marx, proses di atas dapat terjadi tanpa perubahan mendasar pada kekuatan produktif, melainkan perubahan sepenuhnya terjadi pada hubungan sosial produksi, proses inilah disebut Marx sebagai “akumulatif primitif”, karena semenjak itu alat

produksi dan tenaga kerja yang sebelumnya bukan bagian dari modal, kini diubah menjadi modal.⁴¹

Berpijak dari pemikiran Karl Marx tentang konsep kapitalisme di atas, maka muncullah konsep komunisme, yaitu sebuah konsep pemikiran yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan, dalam konteks Indonesia hak milik perorangan tersebut dipegang oleh kaum feodal dan tuan tanah, dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Oleh sebab itu, Soekarno dalam sebuah pidatonya pernah menyatakan bahwa "... Masyarakat jangan sampai keliru menafsirkan makna dari *landreform* tahun 1960, penerapan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil) bukan dalam rangka mempersempit pemilikan tanah, melainkan *landreform* berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani."⁴²

5. Penerapan *Landreform* di Pedesaan Jawa

Studi tentang gerakan petani di negara kita, pertama kali dirintis oleh Sartono Kartodirdjo (1984) dalam karyanya yang terkenal mengenai gerakan petani di Banten pada masa kolonialisme. Beliau menunjukkan bahwa gerakan petani tidak dapat dipahami dengan hanya mengamati salah satu faktor ekonomi,

⁴¹ Bonnie Setiawan, *op. cit.*, hlm. 36-37.

⁴² Edwad C. Keefer (ed.), *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965*, edisi Indonesia, (Jakarta: Hasta Mitra, 2002), hlm. 633.

melainkan juga harus memperhatikan konfigurasi sosial, lembaga-lembaga sosial, norma-norma dan nilai-nilai, begitu pula sikap ideologis sejauh hal itu membentuk dan mengkondisikan gerakan. Dalam hubungannya dengan keresahan agraria dan mobilisasi petani dari pedesaan Jawa dalam tahun 1960-an awal, Sartono melihat masalah itu dalam tiga faktor⁴³ :

1. Struktur agraria yang ada, memberikan gambaran tentang kekuatan sosial dan kepentingan berbagai kelas dalam masyarakat.
2. Adanya persekutuan-persekutuan kelas dan konflik yang mengingatkan bahwa *landreform* pada dasarnya merupakan masalah kekuasaan politik.
3. Diserapkannya politisasi pedesaan ke dalam politik nasional meningkatkan konflik di daerah pedesaan.

6. Konsep “Desa Kepung Kota”

Pemikiran ideologis Mao Ze Dong pada dasarnya memang dibangun lewat persentuhannya dengan karya-karya Marx. Tetapi lewat pengalaman dan pengumpulan langsung dengan imperialisme di Tiongkok, Mao merumuskan apa yang disebutnya Revolusi Demokrasi Baru, yaitu revolusi massa rakyat anti imperialis dan anti feodalisme yang dipimpin proletariat.⁴⁴

⁴³ Sartono Kartodirdjo, “Ratu Adil”, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 134-135., dalam Fadjar Pratikto, *op. cit.*, hlm. 17-18.

⁴⁴ Tzen Po Ta, *Mao Tze Tung Desa Mengepung Kota : Dari Revolusi Demokrasi ke Revolusi Sosialisme*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2000), hlm. 26.



Sedangkan konsep revolusi “Desa Mengepung Kota” didasarkan pada pemahaman Mao Ze Dong bahwa: Jika barisan revolusioner hendak menghimpun serta menguatkan jati dirinya, maka mereka harus mengubah desa yang terbelakang menjadi daerah basis maju dan kokoh. Mengubahnya menjadi daerah basis revolusioner yang jaya dalam kemiliteran, politik, ekonomi, dan kebudayaan agar dapat menggunakannya melawan musuh jahat yang menyerang desa.⁴⁵

Konsep revolusi Mao Ze Dong tersebut juga tidak dapat dielakkan dari persentuhannya dengan pemikiran Menteri Pertahanannya yaitu Marshal Lin Piao. Ia adalah pencetus teori “Perang Semesta antara Kota dan Desa”. Menurut teori ini, dunia dalam dibagi ke dalam bagian “kota” dan bagian “desa”. Kedua daerah ini berada dalam keadaan konfrontasi terus menerus. Karena kota dapat dikepung oleh desa-desa, maka negara kota-negara kota di dunia pasti akan mengalami kekalahan. Menurut Lin Piao selanjutnya, semua negara-negara industrialis adalah kota dan negara-negara yang sedang berkembang (seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin) adalah daerah desa sehingga Perang di Vietnam, menurut teorikus ini adalah suatu contoh yang riil dari peperangan antara kota dan desa.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁶ *Bahagia*, no.9, Djuli 1966, (Surabaya : Surabaya Post), hlm. 14-15.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mengkaji penelitian sejarah ini, penulis berpegang pada pendekatan multidimensional, dan untuk penanganan sumber mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh metode sejarah kritis, yang terdiri dari *heuristik*⁴⁷ (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi atau sintesis dan penulisan.

Sumber-sumber dikumpulkan lalu diadakan seleksi dan pemisahan antara sumber primer⁴⁸ dan sumber sekunder⁴⁹, setelah itu baru diadakan kritik sumber atau seleksi sumber yang terdiri dari kritik ekstern⁵⁰ dan kritik intern⁵¹. Melalui proses

⁴⁷ Dalam menjalankan tahap ini kita harus memiliki prinsip sebagai berikut : "apa yang tidak sesuai ditinggalkan saja, walaupun ada kaitannya dengan tajuk kajian kita !". Sebenarnya apa yang dimaksud dengan memilih sumber-sumber (baik primer maupun sekunder) itu ialah, kita berusaha mendapatkan serta mengkaji semua sumber yang berkaitan dengan tajuk kita, bahkan yang bersinggungan pun juga perlu kita pertimbangkan dan teliti. Lebih lengkapnya lihat Muhd. Yusof Ibrahim, *Pengertian Sejarah : Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah*, (Kuala Lumpur : Naz.Sdn.Bhd, 1986), hlm. 93-94.

⁴⁸ Sumber primer yaitu sumber sezaman dengan peristiwa yang akan diteliti oleh sejarawan, baik berupa sumber lisan dan sumber tertulis. Dikatakan sumber lisan bilamana sumber berasal dari pelaku sejarah yang pernah hidup sezaman dan pernah menetap di Blitar Selatan selama tahun 1963 – 1968, (dengan kriteria informan: mantan pegawai negeri seperti Camat, Kepala desa, dll, mantan aparat militer yang anti PKI, aparat militer yang terlibat PKI, dan Tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang waktu itu sudah bisa mengamati keadaan sekitarnya). Sedangkan sumber tertulis yaitu sumber sejarah yang diterbitkan pada waktu yang sama, yaitu berupa arsip, laporan-laporan kegiatan, dan dokumen-dokumen penting lain yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan. Intinya menurut Kuntowijoyo, bahwa dikatakan sumber primer jika disampaikan oleh saksi mata. Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1991), hlm. 96.

⁴⁹ Sumber sekunder yaitu bisa sezaman maupun tidak sezaman, namun kedua-duanya sudah merupakan hasil pengamatan dari berbagai sumber primer, seperti sumber koran dan media massa, sumber digital, sumber buku, penelitian-penelitian, dan lain-lain. Dan sumber ini diterbitkan setelah peristiwa sejarah terjadi. Menurut Kuntowijoyo, model sumber ini merupakan kebalikan dari sumber primer, yaitu sumber sejarah yang disampaikan oleh yang bukan saksi mata. Lihat *ibid*.

⁵⁰ Tahap ini adalah tahap memilih dan menentukan sumber dengan cara mengkritiknya. Menurut Louis Gottschalk, dalam Muhd. Yusof Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 95-96., kritik ekstern disebut kritik luaran yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu dokumen itu dengan dokumen lain yang sezaman dengannya, yaitu untuk menentukan kesamaan kertas, dakwat atau tinta sejaman, tarikh-tarikh ataupun alat-alat tulisnya.

membaca dari tiap-tiap sumber selanjutnya terpilihilah data-data yang paling relevan, sehingga dengan demikian berlaku prinsip selektif. Dari bermacam-macam data ini kemudian dipilih dan ditentukan fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta ini dihubungkan menjadi suatu rangkaian dan diberi interpretasi sejarah.⁵²

Interpretasi dibuat dalam bentuk *deskriptif analitis* guna menghasilkan karya tulisan yang tidak semata-mata merupakan hubungan antar fakta saja, melainkan suatu karya tulisan sejarah⁵³ yang bulat, utuh dan dapat dimengerti oleh banyak orang.

⁵¹ Pada kritik ini lebih ditekankan pada masalah kelogisan, dan barangkali kita juga mengkaji sumber itu serta membuat beberapa catatan yang diperlukan. Lihat Muhd. Yusof Ibrahim, *ibid.*, hlm. 98.; Dalam proses kritik intern ini, penulis juga berupaya memperjelas kelogisan antar peristiwa dan antar permasalahan dengan bantuan dialektikanya Hegel. Di mana segala paham dengan sendirinya akan menghadapi pertentangan. "*These*" menimbulkan "*antithese*", akan tetapi keduanya dengan sendirinya bersama-sama menimbulkan hasil yang baru "*synthese*". *Synthese* menjadi *these* yang baru atau yang lebih tinggi, selanjutnya berproses lagi seperti proses awal, dan demikian seterusnya. Lihat Pringgodigdo (ed.), *op. cit.*, hlm. 74.; Contoh, yakni adanya gambaran Marx tentang komunis yang didukung oleh kaum buruh (*these*), sedangkan adanya fenomena masyarakat agraris di Tiongkok mengesankan bahwa komunis harus berbasiskan pada kaum tani (*antithese*), sehingga muncul konsep pertentangan kota dan desa yaitu: "dari desa keping kota" oleh Mao Ze Dong (sebagai *synthese*).

⁵² Interpretasi sejarah adalah proses memikirkan kembali atau membayangkan kembali, hingga seakan-akan kita benar-benar menyelami peristiwa sejarah itu sendiri yang tujuannya untuk menentukan kebenaran dari sumber-sumber yang kita tafsiri., lihat Muhd. Yusof Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 98.; Interpretasi atau penafsiran sering juga disebut sebagai biang subyektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh, dan bagi orang lain boleh melihat kembali dan menafsirkan ulang. Oleh sebab itu, maka subyektivitas penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari., lihat Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 100.

⁵³ Penulisan Sejarah merupakan kesimpulan yang terbit dari pemikiran kita terhadap sumber yang ada, lihat Muhd. Yusof Ibrahim, *ibid.*; Sedangkan menurut Kuntowijoyo, dikatakan "penulisan sejarah" jika memenuhi tiga bagian yaitu 1) pengantar, 2) hasil penelitian, dan 3) simpulan yang general, yang mana kesemuanya itu sangat menekankan aspek kronologis. Inilah yang membedakan penulisan sejarah dengan model penulisan non-sejarah atau penulisan sosiologi., lihat Kuntowijoyo, *ibid.*, hlm. 102-104.

Sumber-sumber di atas, secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji, atau dengan kata lain, langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah setelah sumber-sumber dikumpulkan yaitu menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu.⁵⁴

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika skripsi ini, penulis menguraikan ide pokok pada masing-masing bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini dijelaskan mengenai: latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sumber, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM BLITAR SELATAN. Tentang gambaran umum obyek penulisan yang meliputi kondisi geo-politik dan sosial-ekonomi masyarakat Blitar Selatan.

BAB III : KRISIS PANGAN DI BLITAR SELATAN SELAMA DEKADE 1960. Pada bab ini merupakan inti penulisan pertama, yang mencoba memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Blitar Selatan pada

⁵⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2.

khususnya. Kondisi sosial-ekonomi tersebut merupakan sebuah *setting* sosial yang sekiranya mampu menjernihkan pemahaman kita terhadap permasalahan politik di antara tahun 1963-1968 yang penuh hiruk pikuk dan tumpang tindih antar kepentingan.

BAB IV : STRATEGI POLITIK PKI DI BLITAR SELATAN. Pada bab ini merupakan inti penulisan terakhir, yang mencoba mengeksplorasi semaksimal mungkin fenomena politik yang dijalankan PKI (beserta ABRI sebagai *antithese*) di Blitar Selatan pada tahun 1963 hingga 1968, termasuk di dalamnya hendak mendeskripsikan adanya perubahan strategi politik PKI dalam penerapan faham ideologi komunisnya yang akhirnya cenderung berkiblat pada Tiongkok.

BAB V : KESIMPULAN. Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Lalu dilanjutkan dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BLITAR SELATAN